

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN AIR NIPIS**

Oleh: Rohvi Ultami

Pembimbing: Rekho Adriadi, S.IP, M.IP

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: [ultamirohvi@gmail.com](mailto:ultamirohvi@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perlindungan dan pemberdayaan petani mencakup upaya mengatasi tantangan infrastruktur, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, biaya tinggi, dan perubahan iklim, serta meningkatkan kemampuan petani melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan. Tujuannya adalah mencapai kedaulatan dan kemandirian petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini mengevaluasi implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di BPP Kecamatan Air Nipis dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teori Van Meter dan Van Horn digunakan dengan empat indikator: sumber kebijakan, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, tujuan kebijakan, serta komunikasi antar organisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan berjalan baik dari sisi organisasi, didukung oleh struktur efektif dan kerjasama kuat. Namun, ada kendala seperti kegagalan panen, risiko harga, biaya tinggi, dan perubahan iklim. Hambatan ini perlu diatasi untuk mencapai tujuan kebijakan.

**Kata Kunci: implementasi, petani, padi, penyuluhan.**

## **ABSTRACT**

The protection and empowerment of farmers involve addressing challenges related to production infrastructure, business certainty, price risks, crop failures, high costs, and climate change, as well as enhancing farmers' capabilities through education, training, and support. The goal is to achieve farmers' sovereignty and independence to improve their welfare. This study evaluates the implementation of the Farmer Protection and Empowerment Policy at the Agricultural Extension Center in Air Nipis District using a qualitative approach and descriptive methods. Van Meter and Van Horn's theory is applied with four indicators: policy resources, economic, social, and political environment, policy goals, and inter-organizational communication. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the policy is well-implemented organizationally, supported by an effective structure and strong collaboration.

However, there are challenges such as crop failures, price risks, high costs, and climate change. These obstacles need to be addressed to achieve the policy goals.

**Keywords: Implementation, Farmers, Rice, Extension Services.**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sektor pertanian sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Sebagian besar penduduk dan tenaga kerja Indonesia hidup dan bekerja di sektor pertanian, serta produk-produk nasional utama berasal dari sektor ini. Lahan sawah ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi petani dan keluarganya, tetapi juga menyediakan bahan baku penting untuk industri pangan nasional. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian menjadi krusial untuk menjaga ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di masa depan.

Kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintahan, dalam hal ini tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi Pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia berhak serta wajib dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, yang khususnya di bidang pertanian (Dandi, 2014 :95).

Penyelenggaraan dan pengembangan pertanian sangat bergantung pada peran vital petani, yang memberikan kontribusi besar dalam menggerakkan sektor ini. Petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, terutama di Indonesia di mana sebagian besar beroperasi dalam skala kecil. Rata-rata luas lahan usaha tani petani kurang dari setengah hektar, dan banyak di antara mereka bahkan tidak memiliki lahan usaha tani sendiri. Mereka sering kali bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani (Mardikanto, 2012:109).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian Indonesia masih banyak didominasi oleh petani kecil yang bergantung pada akses terhadap lahan dan sumber daya pertanian lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas, petani kecil memainkan peran yang sangat

penting dalam produksi pangan nasional serta dalam menjaga kedaulatan pangan negara. Untuk memajukan pertanian, penting untuk memperhatikan dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh petani kecil, seperti akses terhadap teknologi pertanian modern, pembiayaan yang terjangkau, pelatihan keterampilan, dan keamanan lahan. Dengan mendukung petani kecil, pemerintah dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh negeri.

Perlindungan dan pemberdayaan petani memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.

Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan petani yakni pasal 19 yang menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi para petani. Namun implikasi dari ditetapkannya undang-undang tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

Perlunya optimalisasi melalui kebijakan pemerintah sangat penting untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Nipis. Pertama-tama, perbaikan infrastruktur menjadi langkah krusial untuk mendukung produktivitas pertanian. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, irigasi, dan sarana transportasi yang memadai, akan membantu mempermudah akses petani terhadap pasar dan sumber daya lainnya. Selain itu, penyediaan bantuan sarana prasarana usaha tani, seperti alat pertanian modern dan fasilitas penyimpanan hasil panen yang aman, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani petani.

Kedua, pendidikan dan penyuluhan secara berkala sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menghadapi tantangan baru dalam pertanian modern. Program ini harus dibarengi dengan kemudahan akses petani terhadap informasi dan teknologi terkini, yang dapat membantu mereka mengadopsi praktik pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendukung pertanian yang maju, seperti penyediaan akses yang lebih baik terhadap teknologi pertanian, bantuan dalam hal pembiayaan dan pelatihan, serta memastikan adanya regulasi yang mendukung bagi keberlanjutan praktik pertanian yang berkelanjutan. Melalui upaya ini, pemerintah dapat berperan secara efektif dalam meningkatkan

kesejahteraan petani dan mendukung pencapaian keamanan pangan nasional. Dengan memprioritaskan kepentingan petani dan memastikan perlindungan mereka, pemerintah tidak hanya berinvestasi dalam masa depan pertanian Indonesia tetapi juga dalam kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE**

Adapun jenis Penelitian ini biasanya digunakan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Nipis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang menurut Bogdan dan Taylor dalam buku karya Lexy J. Moleong (2013), adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati. Metode ini dirancang untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti dengan mendalam. Selain itu, dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana objek penelitian dipelajari secara intensif sebagai sebuah kesatuan terpadu. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang detail, mendalam, dan komprehensif tentang fenomena yang diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif ialah salah satu prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan dari seseorang serta perilaku yang diamati (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang kaya dan mendalam. Keputusan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif didasarkan pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi, yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan analisis yang detail untuk mengidentifikasi dan menggambarkan secara akurat aspek-aspek yang relevan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Kualitatif", Bogdan dan Biklen (1992) menekankan bahwa teknik pengumpulan data kualitatif harus memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang dalam terhadap konteks dan pengalaman subjek penelitian. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat penting dalam menjamin keabsahan dan kevalidan data yang diperoleh.

### **1. Wawancara**

Teknik wawancara dicirikan oleh adanya interaksi komunikasi verbal antara peneliti dan informan

yang berkaitan dengan isu penelitian

## 2. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada (Penelitian yang menulis dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Nipis, penulis mengamati secara langsung fenomena yang terjadi untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya.

## 3. Dokumentasi

Dalam rangka penelitian ini, peneliti juga menerapkan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi dilakukan terhadap laporan yang telah diterbitkan dan juga buku-buku referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi dijadikan sebagai perlengkapan dari metode wawancara dalam konteks penelitian kualitatif (Sugiyono, 2000). Dalam hal ini, dokumentasi mencakup analisis struktur organisasi dan profil Balai penyuluhan pertanian.

## Analisis Data

Menurut Mc Drury (Moleong, 2017:248) mengemukakan bahwa analisis data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih

hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

### 2. Sajian data

Dalam penelitian kualitatif, untuk menyajikan data selain data dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan, serta kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasi.

### 3. Penarikan kesimpulan

Pada awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui yaitu dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan juga berbagai proposi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Nipis, Pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006. Peraturan ini secara khusus membahas pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan pemekaran kecamatan baru, yang mengakibatkan terbentuknya Kecamatan Air Nipis. Sejalan dengan kebijakan nasional yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K), pada Bab V Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa di tingkat kabupaten, kelembagaan penyuluhan dipegang oleh Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapelluh), sementara di tingkat kecamatan, fungsi ini diwujudkan dalam bentuk Balai Penyuluhan.

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Nipis kemudian didirikan untuk melaksanakan berbagai program penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sebagaimana yang diatur dalam dokumen BPP Air Nipis tahun 2024 halaman 3. Pembentukan lembaga ini bukan hanya sebagai respons administratif terhadap pembentukan kecamatan baru, tetapi juga sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan penyuluhan pertanian kepada masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya Balai Penyuluhan, diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan sektor pertanian di wilayah Air Nipis melalui berbagai program yang relevan dan terukur, sesuai dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat petani setempat.

Dalam menjalankan fungsinya, BPP Air Nipis menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam penyusunan programnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya kelengkapan data, baik dari setiap instansi terkait maupun dari berbagai bagian lainnya. Hal ini menjadi tantangan serius karena data yang lengkap dan akurat sangat diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan

program penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan. Selain keterlambatan dalam pengumpulan data juga disebabkan karena kurang peduli petugas BPP dalam memberikan dalam rangka penyusunan program.

Program dan materi penyuluhan pertanian di BPP Air Nipis tahun 2024 terdiri dari empat aspek utama. Pertama, mencakup keadaan yang meliputi semua aspek potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal, dan kebijakan pemerintah yang relevan. Kedua, program ini menetapkan tujuan dan sasaran yang bertujuan untuk memenuhi aspirasi petani dan nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka serta mengubah perilaku petani sesuai harapan. Ketiga, masalah yang dihadapi mencakup perilaku dan non-perilaku yang berdasarkan situasi petani dan nelayan, serta menyangkut kelembagaan, prasarana, dan sarana penunjang penyuluhan yang ada. Keempat, program ini menjabarkan cara mencapai tujuan dengan fokus pada peningkatan kemampuan kelompok tani dan kontak tani nelayan.

Materi penyuluhan mencakup berbagai metode dan sistem kerja, termasuk pengamatan lapangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Program juga mencakup pemecahan masalah, penyediaan kemudahan-kemudahan, dan peningkatan kemampuan dalam penyuluhan pertanian.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Nomor 01 tahun 2023,

terdapat informasi yang mendetail mengenai struktur personalia di WKBPP/BPP Air Nipis dan kontribusi penyuluhan swadaya yang diberikan oleh petani milenial dalam pembangunan pertanian di daerah tersebut. Keputusan ini mencakup profil lengkap personalia yang terlibat dalam operasional WKBPP/BPP Air Nipis, termasuk peran masing-masing dalam mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan tersebut. Selain itu, informasi yang tersedia juga mencakup kontribusi dan partisipasi aktif dari petani milenial dalam mengembangkan sektor pertanian,

#### 1. Sumber-sumber kebijaksanaan

Implementasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan petani di Air Nipis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, termasuk ukuran dan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Ukuran kebijakan mencerminkan skala dan ruang lingkup dari tindakan yang direncanakan, sementara tujuan kebijakan menetapkan hasil yang diharapkan dari implementasi tersebut.

Selain sumber kebijakan, sarana penunjang juga berperan penting dalam mendukung tujuan kebijakan. Sarana penunjang ini mencakup segala hal mulai dari infrastruktur fisik hingga sumber daya manusia yang terlatih. Dengan adanya sarana penunjang yang memadai, seperti fasilitas penyuluhan yang lengkap, tenaga teknis yang terampil, dan sistem monitoring yang efektif, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan hasil yang

diharapkan dapat dicapai dengan lebih baik. dalam konteks implementasi kebijakan pemberdayaan dan perlindungan petani di Air Nipis, keselarasan antara sumber kebijakan yang kuat, sarana penunjang yang memadai, dan kesiapan pihak pelaksana merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor pertanian di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menanyakan kepada bapak Ismantoro selaku koordinator BPP, aturan-aturan atau dasar apa saja yang mendasari dalam sebuah perlindungan dan pemberdayaan petani, maka berikut jawaban dari informan:

“aturan-aturan yang mendasari atau dasar dari BPP (balai penyuluhan pertanian) yaitu Permentan Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertaniandan kebijakan pemerintah, dimana kebijakan tersebut kami melaksanakan program pembangunan pertanian, Perkebunan, perternakan, diWKPP/BPP, meningkatkan produktivitas komoditi unggul pertanian pada tanaman pangan padi sawah dari 5,4 ton/Ha menjadi 6,1 ton GKP/Ha.

#### 2. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Secara khusus, dalam konteks ekonomi, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya hasil panen yang dialami oleh petani. Hal ini sering kali disebabkan oleh penggunaan bibit yang kurang berkualitas atau teknik pertanian yang tidak optimal. Misalnya, di Kecamatan Air Nipis, hasil panen padi sawah mengalami penurunan dari 5,4 ton per hektar menjadi 6,1 ton gabah kering panen per hektar (GKP/Ha), mengindikasikan permasalahan yang perlu segera diatasi. Penurunan hasil panen ini secara langsung berdampak pada pendapatan petani, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlanjutan ekonomi mereka.

Dengan mempertimbangkan dan mengatasi tantangan dari aspek ekonomi, sosial, dan politik, badan-badan pelaksana kebijakan seperti BPP Kecamatan Air Nipis dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan petani. Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas bibit, memberikan pelatihan yang lebih intensif, serta membangun jaringan kerja sama yang kuat di antara semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menanyakan Ketika hasil panen para menurun bagaimana perlindungan dan pemberdayaan dari pihak BPP (balai penyuluhan pertanian) yaitu kepada bapak

Bulian Asdar selaku PPL WKPP, maka berikut jawaban informan:

“cara kami dari pihak BPP (balai penyuluhan pertanian) melindungi dan memberdayakannya yaitu membuat program penyuluhan tentang bibit padi yang unggul ke kelompok tani, dan memberikan bibit padi secara gratis ke kelompok tani tersebut”.

### 3. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan

Ukuran dan tujuan kebijaksanaan adalah aspek penting dalam setiap keputusan kebijakan, yang merujuk pada detail yang menyeluruh dan spesifik mengenai tujuan yang ingin dicapai. Dokumen peraturan yang memuat ukuran dan tujuan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terukur dalam mengevaluasi kinerja suatu program atau kebijakan. Kejelasan dalam standar dan sasaran sangat diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks Balai Penyuluhan Pertanian Air Nipis, tujuan dan sasaran kebijakan yang tercantum dalam dokumen program haruslah spesifik dan relevan dengan kondisi lokal serta dapat diukur secara konkret. Hal ini memastikan bahwa upaya pemberdayaan dan perlindungan petani dapat dilakukan dengan efektif dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat petani secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran kebijakan Balai Penyuluhan Pertanian Air Nipis merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor pertanian di wilayah tersebut. Dokumen program ini tidak hanya mencakup target-target spesifik dalam hal peningkatan produktivitas pertanian, juga menguraikan strategi untuk memfasilitasi pelatihan, pendampingan teknis, dan pengembangan keterampilan bagi petani.

Dalam pengembangan sentra produksi unggulan, Balai Penyuluhan Pertanian Air Nipis mengadopsi strategi yang inklusif untuk memperluas area dan meningkatkan produktivitas komoditi pertanian. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sentra komoditi padi sawah serta jagung, yang area sawahnya direncanakan meningkat dari 500 Ha menjadi 750 Ha. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk mengembangkan sentra tanaman, buah-buahan, kelapa sawit, dan karet dengan meningkatkan luas area yang dikelola.

Upaya berikutnya adalah meningkatkan produktivitas komoditi unggulan, seperti padi sawah yang ditargetkan meningkat dari 5,4 ton/Ha menjadi 6,1-ton GKP/Ha. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki hasil panen secara signifikan melalui implementasi praktik-praktik terbaik dan teknologi yang tepat.

Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara holistik, upaya dilakukan untuk memperkuat sumber daya

manusia di bidang pertanian. Ini termasuk peningkatan kelas-kelas kelompok tani dari tingkat pemula hingga utama, peningkatan jumlah koperasi tani, serta peningkatan jumlah petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas petani dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor pertanian.

Peneliti kembali melakukan kajian untuk mengetahui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam program kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam wawancara, informan memberikan gambaran rinci tentang berbagai inisiatif dan langkah konkret yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani. Hasil dari wawancara tersebut mengungkapkan beragam aktivitas seperti pengembangan infrastruktur pertanian, pelatihan keterampilan, penyediaan sumber daya seperti bibit unggul, serta upaya meningkatkan akses pasar bagi produk-produk pertanian., maka berikut jawaban dari informan berikut hasilnya:

dalam perlindungan petani kami memfasilitasi kelompok tani dalam kegiatan program asuransi tanaman pangan (padi), alat pertanian dan bidang perternakan. Juga melakukan pengawasan/monito ring terhadap pupuk bersubsidi pada kios pengencer.”

#### 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan merupakan tahapan implementasi yang kompleks, memerlukan mekanisme dan prosedur institusional yang terstruktur untuk mengatur pola komunikasi secara efektif dari tingkat wewenang tertinggi hingga yang terendah di dalam dan antara organisasi-organisasi terlibat. Pentingnya koordinasi lintas organisasi dalam konteks program implementasi tidak hanya sekadar menjadi kebutuhan, tetapi merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan program tersebut. Dengan adanya koordinasi yang baik, berbagai organisasi dapat bekerja secara sinergis dan efisien, mengurangi potensi tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian, kerjasama lintas organisasi dalam konteks kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani bukan hanya tentang bagaimana menjalin hubungan, tetapi juga bagaimana membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan bersama yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sektor pertanian di tingkat lokal maupun nasional.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan para pelaksana dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, informan

menyampaikan bahwa komunikasi tersebut meliputi berbagai aspek, seperti pertemuan rutin antara semua pihak terkait untuk membahas perkembangan program, penggunaan grup diskusi online untuk berbagi informasi dan pengalaman, serta penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan yang melibatkan petani sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan praktik pertanian maka berikut jawaban dari informan:

“komunikasi antara pihak BPP kecamatan Air Nipis pada saat ini penyuluh pertanian terhadap para petani binaan di WKPP masing-masing, jadi komunikasi kami selalu terjalin dengan baik, misalnya ada sesuatu program yang ingin disampaikan itu sebelumnya di beritahu kepetani programnya berupa apa, Kemudian cara pelaksanaannya bagaimana, begitu pula dengan kegiatan penyuluhan, kalau kegiatan penyuluhan itu di lakukan setiap hari kerja dari aparat BPP Kecamatan Air Nipis terhadap para petani binaan wilayah masing-masing di setiap desa kecamatan Air Nipis. Kami setiap penyuluh punya jadwal penyuluhan ke petani, misalnya Desa Palak Bengkerung hari tanggal jam dikelompok tani masing-masing materi di sepakati sesuai dengan keinginan petani sesuai dengan yang dibutuhkan petani saat itu artinya disetiap wilayah sedang menanam padi jadi

kebutuhan petani itu tentang tanaman padi baik mulai dari pengolahan tanah, pengaturan penanaman, pengaturan air, pengendalian hama dan penyakit sampai ke pasca panen”

Selain melakukan wawancara kepada pihak Balai Penyuluhan Pertanian penelitian melakukan wawancara kepada masyarakat lainnya sebagai berikut:

“Bentuk komunikasi yang diberikan BPP lewat ketua kelompok tani, dan ketua menginformasikan ke anggota lainnya melalui wa grub, misalnya ada penyuluhan bapak informasikan ke anggota yang lain bahwasanya besok ada kegiatan penyuluhan di tempat kalian jadi pihak BPP tersebut menghubungi dan menginformasikan ke yang lainnya.”

Berdasarkan hasil dari wawancara mengenai bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan para pelaksana dalam perlindungan dan pemberdayaan petani Implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas organisasi yang terstruktur dan efektif. Koordinasi yang baik memungkinkan organisasi bekerja sinergis, mengurangi tumpang tindih, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dalam kolaborasi ini, sikap, kapasitas, dan peran para pelaksana serta agen yang terlibat sangat penting untuk pengambilan

keputusan yang tepat dan penguatan program. Bentuk komunikasi meliputi pertemuan rutin, grup diskusi online, serta lokakarya dan pelatihan yang melibatkan petani, membangun fondasi kokoh untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sektor pertanian.

## **KESIMPULAN**

Evaluasi implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Balai Penyuluhan Pertanian menunjukkan kemajuan signifikan. Program ini meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan dan akses teknologi modern, yang berdampak pada produktivitas, kualitas hidup, dan daya saing produk pertanian. Meskipun upaya sosial seperti solidaritas antar kelompok tani dan kolaborasi dengan penyuluh pertanian lapangan telah memperkuat kapasitas lokal, tantangan tetap ada dalam koordinasi politik antara BPP, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait perlindungan irigasi. Evaluasi mendalam dan penyesuaian strategi diperlukan untuk memastikan kebijakan ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi petani serta memperkuat BPP sebagai agen inovasi di sektor pertanian.

### **1. Sumber-sumber**

Kebijaksanaan: Evaluasi kebijakan BPP dalam memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan infrastruktur pertanian, serta dampaknya pada produktivitas dan kesejahteraan petani.

2. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: Penilaian peran BPP dan aparat desa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik lokal melalui kolaborasi dan partisipasi masyarakat.
3. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Pengamatan efektivitas program BPP dalam meningkatkan produksi pertanian, keterampilan petani, dan penguatan kelembagaan lokal.
4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan: Penilaian dinamika komunikasi antara BPP, Dinas Pertanian, kelompok tani, penyuluh, dan aparat desa dalam implementasi program dan kolaborasi.

persawahan melalui program kolaboratif antara petani, BPP, dan pemerintah daerah untuk efisiensi pengelolaan air irigasi dan menghadapi tantangan sosial ekonomi.

7. BPP juga disarankan memperkuat monitoring dan evaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan efektivitas teknis, responsivitas terhadap perubahan sosial ekonomi lokal, dan kepatuhan terhadap regulasi.
8. Kolaborasi erat antara BPP, pemerintah daerah, dan stakeholder lokal diperlukan untuk mengatasi tantangan politik dan administratif, serta mendukung implementasi kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif bagi petani.

Saran ini di harapkan memberikan arahan bagi BPP dalam meningkatkan efektifitas dan dampak dari kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani,serta mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Nipis, antara lain sebagai berikut:

5. BPP disarankan lebih tepat dalam memberikan penyuluhan dan mengatasi kendala petani dengan pendekatan yang terukur dan sesuai kebutuhan lokal serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.
6. BPP perlu meningkatkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan terkait irigasi

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditua Fandhitya Silalahi, Sahat. 2013. Tenaga Kerja: Perspektif Huku, Ekonomi, dan Sosial, Pusat Kajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. Jakarta.
- Agus Eka, Pratama. 2013. Sistem Informasi dan

- Implementasinya. Bandung: Informatika Bandung
- Dewanto, I.D., & Adhikara, M, A.2015. Sistem Penunjang Keputusan Invertasi Saham Dengan Metode SAW Di Bursa Efek. Jakarta: Proceddings Book Seminar dan Konverensi Nasional.
- Anggara, 2017. Peran pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani Di Era pasar bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Astuti, 2021. Implemintasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap penentuan Kawasan prioritas pertanian di Kabupaten Badung. Vol 1 Journal scholar.
- Astuti, Lifa Indri. Hermawan. Mochammad Rozikia. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan pertanian berkelanjutan. Administrasi Publik JAP. Vol. 3. No.11.
- Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, hal.95.
- Emmy, 2016. Tinjauan Yuridis pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani.
- Hiplunudin, Agus. 2017. Kebijakan Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Yogyakarta. Calpulis.
- Ismantoro, 2023 Programa Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Air Nipis. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Jones, Pip. 2010. Pengantar Teori-Teori Sosial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karniawati, Nia dan Indriyani, Dwi, Yuni. 2010. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Cimahi). Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.11 No. 1.
- Lud, Waluyo. (2007). Mikrobiologi Umum. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Mardikanto, 2005 Metode dan Teknik penyuluhan pertanian. Surakarta: Prima Theresia Pressindo.
- Mardikanto, 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Afabeta Miniarni, dkk 2017
- Miftah Thoha. 2014. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, cetakan ke-23. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mulyadi, 2015, Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Moleong, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Malang. Rosdakary
- Naditya, et al, 2013, Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM)Di Kelurahan Sukun Kota Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.6.
- Nugraha, Satriya. UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani Wajib Dipahami. Alumni Universitas Brawijaya. Vol 1-2/24 Juni 2015.
- Nugroho, 2011. Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia Putindo.
- Pratama, Y. 2015. Respon Tanaman Jagung Manis (*Zea mays saccharata*) terhadap kombinasi pupuk anorganik dan pupuk Bio-slurry padat. [Skripsi]. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Bandar Lampung. 7-11.
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta.
- Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
- Taufik, M., & Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, 4(2).
- Tim Penyusun, 2023. Buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Bengkulu. Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process

Conceptual Frame Work.  
Journal Administration and  
Society.

Winarno, 2011 Kebijakan Publik:  
Teori dan proses. Yogyakarta: Media  
Presindo